

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD). Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang konfrenshif.

Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan dan masyarakat umum. Para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari

informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan lainnya, (Mursyidi, 2009: 101).

Permasalahan akuntabilitas publik bias muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Di sisi lain, permasalahan juga bias muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah. Terhadap kemungkinan ini, pihak penyaji laporan keuangan tidak bisa dengan serta merta menyalahkan masyarakat tidak mampu memahami laporan keuangan pemerintah, karena pada umumnya publik membutuhkan informasi yang sederhana dan langsung menyangkut kepentingan mereka, (Mahmudi, 2010: 32).

Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan parapemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (Pakaya, 2011).

Untuk dapat bermanfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif pokok, berdasarkan SAP (2010: 25) keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan harus menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh para penggunanya agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan juga harus disajikan secara jujur dan wajar, bebas dari bias, dan tidak menyesatkan sehingga dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap dan netral, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan agar pengguna dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tersebut maka sangat diperlukan pengendalian intern seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 29) untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Menurut syarat penilaian BPK sebagaimana yang dikutip oleh Mustika (2011: 5), secara umum terdapat enam syarat agar laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu: laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi, sistem aplikasi komputer terintegrasi, aset dan hutang yang diinventarisasi sesuai dengan ketentuan, dan dilaporkan dalam neraca, laporan diserahkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini

ditunjukkan oleh pernyataan BPK yang menemukan kelemahan sistem pengendalian internal pada setiap entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak kepada manajemen pemerintah bahwa organisasi pemerintah telah mencapai tujuannya dengan efektif, dan efisien, memberikan kepastian bahwa perusahaan telah mentaati segala peraturan dan hukum yang berlaku. serta yang paling penting adalah terciptanya sebuah pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern.

Buruknya kualitas informasi dalam laporan keuangan tidak terlepas dari lemahnya sistem pengendalian intern pada pemerintah tersebut sehingga BPK masih memberikan WDP, TW dan TMT. Sehubungan dengan hal tersebut kualitas informasi keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011 terkait dengan kualitas penyajian laporan keuangan dalam empat tahun terakhir masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Salah satu

penyebab dari hal tersebut disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada pemerintah Gorontalo Utara . Untuk Tahun 2011 saja dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, BPK menemukan 6 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern enam kasus tersebut yaitu 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan stuktur Pengendalian intern masing-masing satu kasus. Selain kelemahan pada sistem pengendalian intern ada beberapa kasus yang menyebabkan BPK masih memberikan opini WDP atas LKPD pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya yaitu ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang menyebabkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi ketidakhematan/pemborosan.Ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Melihat masalah diatas tersebut maka untuk menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan pengendalian intern. Pakaya (2011) mengatakan pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi.Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal, serta menjamin dipatuhinya peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yaitu penelitian dari Pakaya (2011) Pengaruh Dimensi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, hasil penelitiannya membuktikan bahwa baik secara simultan dan parsial Dimensi sistem pengendalian intern yang terdiri dari Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. selain itu penelitian dari Nasir dan Oktari (2010) dengan judul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi Dan pengendalian intern terhadap Kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar). Hasil penelitian membuktikan Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisien regresi 0,068 dan signifikansi 0,008 (alpha 0,05).

Penelitian lainnya yaitu penelitian Afrianti(2011) dengan judul Analisis Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan (studi pada SKPD di Kabupaten Batang) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sdm, pengamanaan teknologi informasi dan SPI memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kembali penelitian serupa dengan judul Pengaruh sistem Pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern Adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kasus administrasi, dan ketidakefektifan sehingga BPK masih memberikan poini WDP atas kualitas lapoan keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internterhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internterhadap kualitas informasi laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dalam penelitian initerdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teorisdari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan dimensi sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktisdari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahkabupaten Gorontalo utara dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan.